

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan program agar jauh lebih baik . Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat kedepan,dan mengarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut akan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan.

Istilah evaluasi menurut Mohammad (2000:5) dapat disamakan dengan penafsiran pemberian angka dan penilaian. Oleh karena itu hasil evaluasi seringkali dijadikan sebagai umpan balik bagi program sehingga pelaksanaan program dapat meningkatkan efektifitas dan efisien

Menurut O. Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan semua proses pemerintah.Aktivitas yang dirancang dalam kegiatan mengevaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama,yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Evaluasi dilakukan dengan maksud dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dapat dipelajari untuk perbaikan masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran(outputs), hasil (outcomes) dan dampak (impacts)dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel.

Kaitan pengertian evaluasi diatas dimana evaluasi dapat mengetahui rancangan suatu program yang berkaitan dengan pelaksanaan dari setiap program tersebut.

2.1.2 Indikator evaluasi

William N. Dunn menggambarkan 6 tipe evaluasi antara lain

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan\ Kesamaan
5. Responsivitas
6. Ketetapan

2.1.3 Jenis- jenis Evaluasi

secara umum evaluasi dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Evaluasi pada tahap perencanaan

kata Evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbagai tehnik yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah

metode- metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dari permasalahan sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksana.

Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan melakukan analisis untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksana dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan monitoring/ pengendalian. Monitoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat dan proyek tersebut direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Monitoring melihat apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana tersebut, dan sudah tepat untuk mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah, apakah pencapaian hasil proyek tersebut akan memecahkan masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut, baik membantu atau menghambat.

3. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Disini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksana, hanya perbedaannya yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksana dibanding rencana, tetapi hasil pelaksana dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang dicapai.

Dari ketiga jenis Evaluasi diatas, penelitian ini merupakan evaluasi pada tahap pelaksana program rumah layak huni yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah didesa Compang Dalo.

Di dalam ilmu evaluasi program, ada banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program, meskipun antara satu dengan yang lain berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berhubungan

dengan objek yang dievaluasi, yang tujuan menyediakan bahan bagi pengambilan keputusan dalam menentukan tindak lanjut program.

Kaufirman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi beberapa model (dalam Subarsono, 2005, 189) yaitu:

1. *Goal Oriented Evaluasi Model*

Merupakan model yang muncul paling awal yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimuali. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus mengecek sejauh mana tujuan tersebut terlaksana da dalam proses pelaksanaan program.

2. *Goal Free Evaluation Model*

Model ini dapat dikatakan berbeda dengan model *Goal Orientation Evaluation* karena dalam melakukan evaluasi, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program akan tetapi bagaimana kerjanya program dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik dalam hal positif maupun dalam hal negatif, karena tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus,jika masing-masing tujuan khusus tercapai artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memperhatikan sejauh mana masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir.

3. *Formatif-Sumatif Evaluation Model.*

Model ini merupakan pada adanya tahap dala lingkungan objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yag dilakukan pada waktu program masih berjalan(evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (evaluasi sumatif).

Tujuan dari evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan mengetahui hambatan-hambatan, pengambilan keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan

2.1.4 Fungsi evaluasi

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat sebuah kebijakan perlu untuk dievaluasi yaitu:

- 1) Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
- 2) Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target dalam menanyakan tujuan dan sasaran.
- 3) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru.

2.1.5 Proses Evaluasi

Proses evaluasi yang dimaksud untuk menguraikan dan memahami bagaimana berjalannya sebuah program. proses evaluasi kebanyakan memerlukan deskripsi tentang

berjalannya suatu program, berdasarkan pengamatan dengan petugas administrasi program, banyak proses evaluasi berpusat pada bagaimana program itu dijalankan .

“Proses” sebagai fokus dalam evaluasi berimplementasi pada bagaimana dalam melihat hasil atau keluaran yang dihasilkan dari pada hanya melihat hasilnya, suatu analisis proses dengan mana suatu program membuahkan hasil. Proses evaluasi itu berkembang, deskriptif, berkesenambungan, luwes, dan induktif. Evaluator proses mengedepankan pemahaman dan mendokumentasi realita dari hari ke hari suatu rogram selama pengkajian. Evaluator mencoba mengurai apa yang sesungguhnya terjadi pada suatu program dalam suatu pencarian pola utama dan nuansa penting yang memberi karakter program. Proses evaluasi mensyaratkan adanya kepekaan baik kualitatif maupun kuantitatif yang berubah dalam program selama perkembangan artinya menjadi sangat akrab dengan hal rinci sebagai suatu program. Proses evaluasi memandang tidak hanya aktifitas moral dan hasil yang diharapkan, tetapi juga menyelidiki pola-pola tidak formal dan akibat yang tidak diharapkan, tetapi juga menyelidiki pola-pola tidak formal Akhirnya proses evaluasi biasanya memasukan persepsi orang yang dekat dengan program mengenai bagaimana semuanya berjalan.

Proses evaluasi mengambil keputusan sehingga bisa berjalan suatu program. Proses evaluasi juga berguna dalam memungkinkan masyarakat untuk tidak terlibat secara dekat dalam program, sebagai contoh pemberi dana dari luar pegawai pemerintah, ini memungkinkan orang luar untuk membuat suatu keputusan yang lebih cerdas tentang bertanggung jawab mengenai suatu program, pada akhirnya proses evaluasi pada umumnya berguna untuk memperluas gagasan dan mengikuti program dibawah suatu kondisi dimana program itu telah dilakukan sebagai proyek percontohan atau pertimbangan sebagai model yang berguna untuk dijadikan contoh.

Proses melakukan evaluasi mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang dianut. Namun evaluasi harus memasukan ketentuan dari tindakan sejalan dengan fungsi evaluasi yaitu:

- a. Memfokuskan evaluasi
- b. Mendesain evaluasi
- c. Mengumpulkan informasi
- d. Menganalisa Informasi
- e. Melaorkan hasil evaluasi
- f. Mengolah evaluasi

2.1.6 Pendekatan dalam evaluasi

Pengetahuan tentang evaluasi akan mempengaruhi jawaban bagaimana evaluasi. Ada beberapa konsep tentang evaluasi dan bagaiman melakukannya yang dinamakn pendekatan evaluasi, istilah pendekatan evaluasi ini diartikan sebagi beberapa pendapat tentang apa tugas evaluasi dan bagaimana dilakukan dengan kata lain tujuan dan prosedur evaluasi.

Michael Schriren mengemukakan beberapa pendekatan dalam evaluasi (dalam Farida Yusuf ,2006,64), yaitu

a. Pendekatan Experimental

Yang dimaksud dengan pendekatan experimental yaitu evaluasi yang berorientasi pada pengguna experimental science dalam program evaluasi. Pendekatan ini berasal dari kontrol experimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik, tujuan evalator yaitu untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu yang mengontrol sebanyak–banyaknya faktor dalam pengaruh program.

b. Pendekatan yang berfokus kepada keputusan.

Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengolahan program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini, informasi akan sangat berguna apabila dapat membantu para pengelola program pembuat keputusan, oleh karena itu kegiatan evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk suatu program.

c. Pendekatan yang responsif

Dalam pendekatan ini evaluasi berarti mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang dari semua orang yang terlibat, yang berminat dan yang berkepentingan dengan evaluasi, evaluator tidak begitu percaya ada satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang dapat ditemukan dengan tes, kuesioner, atau analisis statistik. Tetapi setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakan secara unik dan evaluator mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan menguraikan pertanyaan melalui pandang orang-orang tersebut. Tujuan evaluator adalah berusaha mengerti urusan program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

d. Pendekatan evaluasi bebas dari tujuan .

Evaluasi program secara tradisional artinya mengukur pencapaian suatu tujuan, berdasarkan perangkat yang dibuat sebelumnya secara hati-hati dari tujuan yang dapat diukur. Evaluasi bebas dari tujuan artinya mengumpulkan data secara langsung tentang pengaruh dan efektifitas program tanpa dibatasi oleh fokus sempit yang dinyatakan sebagai tujuan. Pada umumnya evaluasi bebas dari tujuan masyarakat evaluator mendapat penilaian tentang apakah program itu mencoba melakukan sesuatu dengan memfokuskan pada temuan apa yang sebenarnya terjadi dalam program dan sebagai akibat dari program. Evaluator selanjutnya dapat mencapai terbuka apakah data muncul dari fenomena suatu program.

2.2 Rumah Layak Huni

2.2.1 Pengertian Rumah Layak Huni

Sebuah rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Kapan dan bagaimana sebuah rumah dapat dikatakan layak ? Pengertian layak sangat subjektif, sehingga indikator layak bagi seseorang akan berbeda dengan orang lain, layak itu bersifat relatif. Tentu saja dalam hal ini sebuah rumah dan pemukiman yang layak, harus tetap dibatasi bertujuan agar bisa diterima secara obyektif .

Menurut peraturan menteri negara perumahan rakyat republik indonesia Nomor : 22/Permen/M/2008 Tentang standar minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Pada dasarnya rumah layak huni memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat itu sendiri. Manfaat terbesar dengan memiliki rumah layak huni yakni datangnya kenyamanan dalam menjalankan kehidupan sehari – hari. Dengan adanya kenyamanan, tentunya kehidupan dalam berkeluarga menjadi tentram, rukun, aman, dan bahagia .

Dengan memiliki rumah layak huni adanya terselenggara kesehatan dari setiap masing – masing individu dalam keluarga. Permasalahan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat miskin adalah ketimpangan antara jumlah warga miskin dengan kebutuhan yang harus disediakan, tidak adanya akses prasaran.

Program bantuan rumah layak huni merupakan kebijakan pemerintah dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang berbasis bantuan langsung tunai bantuan langsung tunai berupa tunai . Secara umum program bantuan rumah layak huni bertujuan untuk mengatasi kemiskinan.

Pengertian perumahan biasa dikaitkan dengan pembangunan sejumlah rumah oleh berbagai instansi baik pemerintah atau swasta dengan disain unit-unit rumah yang sama. Jumlah rumah dan kelompok perumahan tidak tertentu, dapat terdiri dari dua atau tiga rumah atau dapat juga sampai ratusan rumah, bentuknya tidak terbatas

2.2.2 Aspek –aspek perencanaan perumahan

Untuk membuat sebuah perencanaan perumahan yang benar dapat menuntut pembangunan perumahan maka dipertimbangkan aspek-aspek perencanaannya. Dengan memperhatikan aspek-aspek perencanaan sepanjang pembangunan, diharapkan baik arah maupun laju pembangunan perumahan akan dapat mencapai suatu kondisi dimana jumlah dan kualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan aspek-aspek yang mendasari perencanaan pembangunan antara lain:

a. Lingkungan

Hal yang paling utama yang diperhatikan dalam perencanaan perumahan adalah lingkungan yang baik dan terarah. Karena lingkungan yang terarah merupakan aspek yang sangat menentukan keberadaan dari setiap warga. Hal tersebut dapat terjadi karena baik buruknya kondisi lingkungan akan berdampak terhadap penghuni perumahan. Pertimbangan terhadap faktor – faktor lingkungan dalam perencanaan perumahan mutlak diperlukan karena pada dasarnya proses terbentuknya lingkungan merupakan akumulasi dari unit-unit rumah sebagai pembentuk perumahan tersebut.

b. Daya beli

Perencanaan bangunan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah direncanakan dalam sebuah program. kebutuhan ruang, konstruksi bangunan, ataupun bahan bangunan yang digunakan dengan jangkauan pelayanann.

faktor –faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat antara lain:

- a) Pendapatan Per kapita sebagian besar masyarakat yang masih rendah
(dibawah standar)
- b) tingkat pendidikan sebagian masyarakat, terutama didaerah pedesaan yang masih relatif rendah
- c) pembangunan yang belum merata pafda berbagai daerah sehingga memicu timbulnya kesenjangan sosial dan ekonomi.

c. Kelembagaan

Keberhasilan pembangunan perumahan pada suatu wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pihak yang berkewajibam untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptannya keberhasilan pembangunan tersebut Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan memegang peran penting dalam setiap program pembangunan yang dijalankan.

2.3 Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni

Pelaksanaan program rumah layak huni tersebut ditujukan untuk masyarakat miskin yang ada di Desa Compang Dalo Kabupaten Manggarai .untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang dibangun adalah rumah dilengkapi fasilitas MCK. Kriteria masyarakat yang berhak untuk mendapatkan rumah layak huni antara lain :

1. Memiliki kartu tanda penduduk
2. Memiliki kartu keluarga
3. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak dipakai
4. Mata pencaharian petani atau buruh
5. Membuat surat perjanjian untuk tidak menjual rumah

6. Memiliki surat tanah milik pribadi / hibah

Program rumah layak huni dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pembangunan bidang pemukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat Tahun 2009, merupakan program pembangunan yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat melalui :

- a. Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan
- b. Keberpihakan pada kaum miskin : orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin
- c. Otonomi dan desentralisasi masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan , pengawasan maupun pemanfaatan hasil
- d. Partisipatif, masyarakat terlihat secara aktif dalam kegiatan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong. keterlibatan masyarakat dimulai dari tahap perencanaan. partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dilakukan antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, partisipatif dibedakan menjadi 2 model yaitu partisipatif mobilisasi dan partisipatif otonom. model partisipatif mobilisasi dalam arti masyarakat diatur sedemikian sehingga secara bersama-sama dilibatkan dalam suatu kegiatan, sedangkan model partisipatif otonom yang dimana masyarakat secara sukarela memberikan inisiatif dan prakarsanya dalam suatu kegiatan.